



PEMKAB. LUWU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II, III DAN IV

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Nomor : 001/PK/BAPENDA/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID,SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,  
BUPATI LUWU TIMUR,

**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,

**MUHAMMAD SAID,SE.MM**



**PERJANJIAN KINERA TAHUN 2024**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| No<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)                                                             | Indikator Kinerja<br>(3)                                     | Target<br>(4) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah                                            | Persentase penerimaan pendapatan daerah                      | 100,20 %      |
|           |                                                                                      | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah | 26,07 %       |
| 2         | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                 | 71,25         |

| No            | Nama Program                                                | Anggaran (Rp)            |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16.161.179.050,00        |
| 2             | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                       | 3.296.466.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                             | <b>19.457.645.050,00</b> |

Malil, Januari 2024

**BUPATI LUWU TIMUR,**



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

**Kepala Badan,**



**MUHAMMAD SAID, SE.MM**

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1.**

**Uraian Sasaran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

**Indikator Kinerja:**

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

**1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah**

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                                                                                                                                                | <b>Relevansi</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Formulasi</b>                                                                     | <b>Sumber data</b>                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.        | Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur | Nilai Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah | Realisasi Pendapatan Daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus | Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bidang |

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                       | Target   | Penjelasan                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah | 100,20 % | Target tersebut ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya karena realisasi sudah melampaui target Renstra |

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian                                                                                                                                                         | Relevansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formulasi                                                                                    | Sumber data                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur | Nilai Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin besar kemandirian finansial daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus | Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang |

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                         | Target  | Penjelasan                                             |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 26,07 % | Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra. |

## **Penjelasan Kinerja 2**

### **Uraian Sasaran 2**

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

### **Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Relevansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formulasi                                                                 | Sumber Data                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | <p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p> | <p>Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.</p> | <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP</p> | <p>Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat</p> |

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja            | Target | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 71,25  | <p>Target yang ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten yaitu 71,10 (BB) yang mana telah melampaui target akhir Renstra 2021-2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah mengacu pada realisasi Tahun 2023.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk tahun 2024 sebesar 71,25 (Nilai)</p> <p>Angka tersebut termasuk dalam kategori BB dengan nilai (&gt;70 – 80).</p> |

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE,MM  
NIP. 19790113 200502 1 010





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 002/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marlina, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE,MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan

**MUHAMMAD SAID, SE.MM**

Nip. 19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,  
Sekretaris

**MARLINA, SE**

Nip. 19730310 200312 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                         | TARGET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                         | (3)                                                                                       | (4)    |
| 1.  | Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah                                            | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu          | 100%   |
| 2.  | Tertib Administrasi Keuangan                                                                | Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik                           | 100%   |
| 3.  | Kualitas Pengelolaan Asset                                                                  | Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan Sesuai Standar                      | 100%   |
| 4.  | Kualitas Sumber Daya Manusia Organisasi Perangkat Daerah dengan Rata – Rata Capaian Kinerja | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | 100%   |
| 5.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah                                            | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100%   |
| 6.  | Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                               | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi                            | 100%   |
| 7.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah                                 | Persentase Rata – Rata Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %  |
| 8.  | Kualitas Pemeliharaan Aset                                                                  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara dengan Baik | 100 %  |

| Kegiatan                                                                 | Anggaran             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp. 77.779.300,-     |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp. 13.296.132.860,- |
| 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Rp. 13.581.000,-     |
| 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Rp. 280.601.000,-    |
| 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp. 691.790.370,-    |
| 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Rp. 1.317.170.000,-  |
| 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp. 271.954.520,-    |
| 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 187.930.000,-    |

Malili, 2 Januari 2024

Kepala Badan,

Sekretaris,



**MUHAMMAD SAID, SE.MM**  
Nip. 19790313 200502 1 010



**MARLINA, SE**  
Nip. 19730310 200312 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 003/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bapenda

**MUHAMMAD SAID, SE.MM**  
Nip. 19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendapatan  
Daerah

**CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM**  
Nip.19790206 201001 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN KEGIATAN                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                              | TARGET   |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                                                            | (4)      |
| 1.  | Tercapainya potensi PAD yang optimal | Persentase realisasi potensi PAD Non PBB dan BPHTB terhadap potensi PAD yang teridentifikasi Non PBB dan BPHTB | 97, 50 % |

**Kegiatan**

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Anggaran**

Rp.849.508.000,-

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bapenda



**MUHAMMAD SAID, SE.MM**  
Nip. 19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendapatan  
Daerah



**CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM**  
Nip.19790206 201001 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 004/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati Rijal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bapenda

**MUHAMMAD SAID, SE.MM**  
Nip.19790313 200502 1 010

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengelolaan  
Pendapatan Daerah

**HERAWATI RIJAL, SE**  
Nip.19851115 201001 2 027

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN KEGIATAN                             | INDIKATOR KINERJA                                                                | TARGET  |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                          | (3)                                                                              | (4)     |
| 1.  | Tercapainya penerimaan PAD non PBB dan BPHTB | Persentase realisasi PAD non PBB dan BPHTB terhadap target PAD non PBB dan BPHTB | 97,50 % |

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 1.409.101.000

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bapenda

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengelolaan  
Pendapatan Daerah

  
**MUHAMMAD SAID, SE.MM**  
Nip.19790313 200502 1 010

  
**HERAWATI RIJAL, SE**  
Nip.19851115 201001 2 027



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor :005/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparman, SAP

Jabatan : Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Said, SE.MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bapenda

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang PBB-P2 dan  
BPHTB

  
**MUHAMMAD SAID, SE.MM**  
Nip.19790313 200502 1 010

  
**SUPARMAN, SAP**  
Nip.19780602 200312 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN KEGIATAN                     | INDIKATOR KINERJA                                                    | TARGET  |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| (1) | (2)                                  | (3)                                                                  | (4)     |
| 1.  | Tercapainya penerimaan PBB dan BPHTB | Persentase realisasi PBB dan BPHTB terhadap target PAD PBB dan BPHTB | 97,50 % |

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp. 1.037.856.000

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bapenda

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang PBB-P2 dan  
BPHTB



**MUHAMMAD SAID, SE.MM**

Nip.19790313 200502 1 010



**SUPARMAN, SAP**

Nip.19780602 200312 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 006/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmawati. M, ST

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marlina, SE

Jabatan : Sekretaris Bapenda

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 20224

Pihak Kedua,  
Sekretaris Bapenda

**MARLINA, SE**

Nip. 19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,  
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

**IRMAWATI. M, ST**

Nip. 19771126 200604 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN KEGIATAN</b>                                            | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                                                                                         | <b>TARGET</b>  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1)       | (2)                                                                | (3)                                                                                                                                              | (4)            |
| 1.        | Tersusunnya dokumen RKA-SKPD                                       | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                | 2 Dokumen      |
| 2.        | Tersusunnya dokumen DPA-SKPD                                       | Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                | 2 Dokumen      |
| 3.        | Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah                       | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                 | 10 Laporan     |
| 4.        | Tersusunnya dokumen perencanaan                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 2 Dokumen      |
| 5.        | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                                                                              | 12 Dokumen     |
| 6.        | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah         | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 19 Laporan     |
| 7.        | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN                                 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                | 29 Orang/bulan |

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       | Rp. 3.002.000,-      |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                               | Rp. 3.000.300,-      |
| 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Rp. 11.135.000,-     |
| 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | Rp. 60.642.000,-     |
| 5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/<br>Verifikasi Keuangan SKPD             | Rp. 21.377.000,-     |
| 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp. 103.174.000,-    |
| 7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Rp. 13.119.913.860,- |

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Bapenda

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a small flourish.

**MARLINA, SE**

Nip. 19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,  
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'I' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

**IRMAWATI, M, ST**

Nip. 19771126 200604 2 016





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 007/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salbaiti, S.AN

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Marlina, SE

Jabatan : Sekretaris Bapenda

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Bapenda

**MARLINA, SE**

Nip.19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

**SALBAITI, S.AN**

Nip. 19810329 201001 2 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN<br/>SUB KEGIATAN</b>                                                | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                                 | <b>TARGET</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1)       | (2)                                                                            | (3)                                                                                      | (4)           |
| 1         | Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD                     | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               | 4 Laporan     |
| 2         | Termutakhirnya laporan data administrasi kepegawaian                           | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                         | 12 Dokumen    |
| 3         | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan                         | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                     | 450 Orang     |
| 4         | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara                | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan | 29 Orang      |
| 5         | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan       | 5 Paket       |
| 6         | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                  | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                           | 2 Paket       |
| 7         | Tersedianya bahan logistik kantor                                              | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                       | 18 Paket      |
| 8         | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                     | Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                              | 3 Paket       |
| 9         | Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan                            | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan             | 36 Dokumen    |
| 10        | Tersedianya makan minum tamu                                                   | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                 | 4 Laporan     |
| 11        | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                          | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                      | 160 Laporan   |
| 12        | Terlaksananya pengadaan mebel                                                  | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                       | 39 Unit       |
| 13        | Terlaksananya pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                  | 42 Unit       |
| 14        | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau                | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang                | 2 Unit        |

| NO | SASARAN<br>SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14 | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                   | 2 Unit     |
| 15 | Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar                                | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | 12 Laporan |
| 16 | Terbayarnya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik                        | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 12 Laporan |
| 17 | Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor                                    | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan |
| 18 | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan             | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit     |
| 19 | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin                                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                     | 34 Unit    |
| 20 | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 1 Unit     |

| Sub Kegiatan                                                        | Anggaran            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Rp. 13.581.000,-    |
| 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Rp. 43.306.000,-    |
| 3. Sosialisasi Peraturan Peundang- Undangan                         | Rp. 54.465.000,-    |
| 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Rp. 239.070.000,-   |
| 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 5.300.000,-     |
| 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Rp. 2.000.000,-     |
| 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Rp. 7.905.570,-     |
| 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Rp. 171.247.000,-   |
| 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan         | Rp. 3.720.000,-     |
| 10. Fasilitas Kunjungan Tamu                                        | Rp. 11. 250.000,-   |
| 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Rp. 479. 185. 800,- |

|                                                                                                                         |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 12. Pengadaan Mebel                                                                                                     | Rp. | 26.550.000,-  |
| 13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Rp. | 454.620.000,- |
| 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Rp. | 864.000.000,- |
| 15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Rp. | 27.154.520,-  |
| 16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Rp. | 204.000.000,- |
| 17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Rp. | 40.800.000,-  |
| 18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. | 54.920.000,-  |
| 19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Rp. | 64.860.000,-  |
| 20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Rp. | 71.000.000,-  |

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Bapenda



**MARLINA, SE**

Nip.19730310 200312 2 005

Pihak Pertama,  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



**SALBAITI, S. AN**

Nip.19810329 201001 2 019





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 008/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ekawati, S.AN

Jabatan : Kasubid. Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Potensi

**CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM**

Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,  
Kasubid. Perencanaan dan  
Pengembangan Potensi  
Pendapatan Daerah

**EKAWATI, S.AN**

Nip.19831201 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                 | TARGET     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                                               | (4)        |
| 1.  | Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan | Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah                                   | 4 Dokumen  |
| 2.  | Tersedianya data pelaporan pajak daerah                | Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi | 12 Laporan |

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                  | Rp. 123.011.000,- |
| 2. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Rp. 146.137.000,- |

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendapatan Daerah



**CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM**  
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,  
Kasubid. Perencanaan dan  
Pengembangan Potensi  
Pendapatan Daerah



**EKAWATI, S.AN**  
Nip.19831201 200901 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 009/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rannu Lusinup Siampa, SE

Jabatan : Kasubid. Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Chaeruddin Arfah M, S.IP, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendapatan Daerah

**CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM**  
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,  
Kasubid. Penyuluhan, Keberatan  
dan Regulasi Pendapatan Daerah

**RANNU LUSINUP SIAMPA, SE**  
Nip.19760715 200604 2 028



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN SUB KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                   | (4)        |
| 1.  | Tersedianya hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah | Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah | 6 Dokumen  |
| 2.  | Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah                                 | Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah                       | 12 Laporan |
| 2.  | Terfasilitasinya layanan dan konsultasi pajak daerah                                               | Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah                                                            | 24 Layanan |

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Rp. 333.811.000,- |
| 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Rp. 194.430.000,- |
| 3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          | Rp. 52.119.000,-  |

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendapatan Daerah



**CHAERUDDIN ARFAH M, S.IP, MM**  
Nip.19790206 201001 1 009

Pihak Pertama,  
Kasubid. Penyuluhan, Keberatan  
dan Regulasi Pendapatan Daerah



**RANNU LUSINUP SIAMPA, SE**  
Nip.19760715 200604 2 028



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 010/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sasi Daniar, SE

Jabatan : Kasubid. Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Herawati Rijal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengelolaan  
Pendapatan Daerah

**HERAWATI RIJAL, SE**  
Nip.19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pendataan, Pendaftaran  
Pendaftaran Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

**SASI DANJAR, SE**  
Nip.19830130 201001 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                | TARGET      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                                                                              | (4)         |
| 1.  | Terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah (Non PBB dan BPHTB) | Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek wajib pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (Non PBB dan BPHTB) | 12 Laporan  |
| 2.  | Terlaksananya penetapan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)                       | Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB)                                                                        | 145 Dokumen |

**Sub Kegiatan**

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2. Penetapan Wajib Pajak Daerah

**Anggaran**

Rp. 225.039.600,-  
Rp. 855.484.400,-

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengeloaan  
Pendapatan Daerah



**HERAWATI RIJAL, SE**  
Nip.19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pendataan, Pendaftaran  
Pendaftaran Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah



**SASI DANIAR, SE**  
Nip.19830130 201001 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor :011/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gatotrianto. B, SE

Jabatan : Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Herawati Rijal, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengelolaan  
Pendapatan Daerah

**HERAWATI RIJAL, SE**  
Nip. 19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,  
Kasubid. Penagihan dan  
Pemeriksaan Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah

**GATOTRIANTO. B, SE**  
Nip. 19810504 201503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR KINERJA                                                           | TARGET     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                                         | (4)        |
| 1.  | Tercapainya penagihan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB) | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB dan BPHTB) | 98 Dokumen |

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Penagihan Pajak Daerah

Rp. 328.578.000,-

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengeloaan  
Pendapatan Daerah



**HERAWATI RIJAL, SE**  
Nip. 19851115 201001 2 027

Pihak Pertama,  
Kasubid. Penagihan dan  
Pemeriksaan Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah



**GATOTRIANTO. B. SE**  
Nip. 19810504 201503 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 012/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmadamayanti, S.S

Jabatan : Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suparman, SAP

Jabatan : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan  
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan  
Data dan Informasi

  
**SUPARMAN, SAP**

Nip.19780602 200312 1 006

  
**RAHMADAMAYANTI, S.S**  
Nip. 19840809 201101 2 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN SUB KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2)                                                                                  | (3)                                          | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya pelayanan, pengelolaan data objek pajak yang akan disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya | 115000 Objek Pajak |

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp. 1.037.856.000,-

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan  
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pelayanan, Pengelolaan  
Data dan Informasi

  
**SUPARMAN, SAP**

Nip.19780602 200312 1 006

  
**RAHMADAMAYANTI, S.S**  
Nip. 19840809 201101 2 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 013/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Abdullah, SE,M.Si

Jabatan : Kasubid. Penagihan dan Pemeriksaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suparman, SAP

Jabatan : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan  
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,  
Kasubid. Penagihan dan  
Pemeriksaan PBB dan  
BPHTB

**SUPARMAN, SAP**

Nip.19780602 200312 1 006

**AGUS ABDULLAH, SE.M.Si**

Nip.19780828 201001 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

| NO  | SASARAN SUB KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET             |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                          | (4)                |
| 1.  | Terlaksananya objek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya | 115000 Objek Pajak |

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp. 1.037.856.000

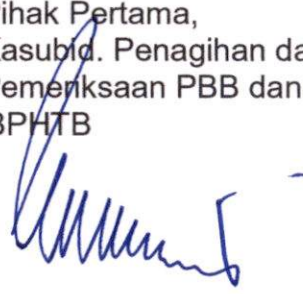
Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan  
Hak atas Tanah dan Bangunan

Pihak Pertama,  
Kasubid. Penagihan dan  
Pemeriksaan PBB dan  
BPHTB

  
**SUPARMAN, SAP**

Nip.19780602 200312 1 006

  
**AGUS ABDULLAH, SE.M.Si**  
Nip.19780828 201001 1 014